

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

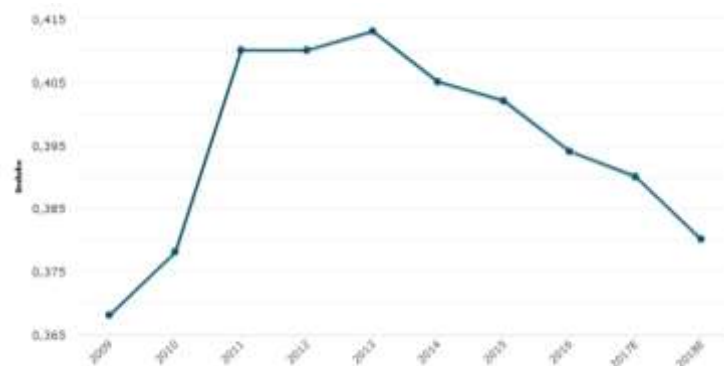
Isu-isu perihal dinamika masyarakat di perbatasan merupakan topik yang sepatutnya mendapat perhatian khusus dan serius dari kalangan tertentu di Indonesia. Wilayah perbatasan antarnegara merupakan kawasan yang penting dalam menjaga sebuah kedaulatan negara yang harus mendapatkan perhatian penuh oleh pemerintah. Perbatasan adalah titik penting beranda sebuah negara yang seharusnya dikelola secara baik (Feneteruma, 2018). Ada kaliatannya jika melihat keberlangsungan hidup masyarakat di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Khususnya wilayah terdepan kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) menjadi etalase utama suatu negara yang harus dijaga seutuhnya untuk menciptakan suasana yang aman dan tenang bagi masyarakatnya disana. Beberapa kawasan perbatasan tersebut merupakan kawasan strategis yang dijadikan sebagai persimpangan suatu negara dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena sebagian kawasan tersebut merupakan pintu gerbang bagi orang asing atau pihak luar lainnya yang berminat untuk memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat perbatasan di Republik Indonesia seringkali adalah mereka yang infrastrukturnya buruk. Sebagian besar wilayah perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak, Malaysia juga termasuk sebagai Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (D3T) yang saat ini menjadi prioritas pembangunan sesuai dengan visi Nawacita dari Presiden Joko Widodo (Itasari, 2019). Beberapa kajian yang membahas tentang masyarakat lokal yang bereada di beranda perbatasan minim memberikan kabar menggembirakan dari

segi jumlah baik dari segi dampak hasil analisis yang berupa gebrakan kebijakan pasca kajian.

Wilayah perbatasan memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang utama dari suatu negara dan representasi dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Permasalahan sosial dan ekonomi yang sering dihadapi di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Setidaknya ada pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh pihak pemerintahan sebagai dasar untuk mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat yang ada di perbatasan Poros Utara Indonesia, khususnya di pulau Kalimantan. Wilayah Kalimantan sendiri telah di bangun jalan perbatasan sepanjang 1.900 KM dan di perkirakan akhir 2017 akan rampung sepanjang 1.582 KM. Ada beberapa manfaat yang di munculkan atas pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan yaitu untuk menciptakan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Selain itu mengurangi kesenjangan pendapatan & kesenjangan antar wilayah. Maka akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah pinggiran perbatasan dan mengurangi tingginya disparitas harga di masing-masing wilayah serta yang terpenting sebagai pondasi pendukung dari keberlangsungan hidup di perbatasan yaitu dengan menghubungkan daerah yang dahulu terisolir ke akses transportasi. Melalui pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, “Pembangunan infrastruktur di perbatasan tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di perkotaan, namun juga untuk mengurangi ketimpangan”. Karena adanya pembangunan tersebut, terciptalah pemerataan infrastruktur yang berkeadilan. Selain itu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bersama Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Malaysia bersepakat membentuk task force bersama. Tujuannya, untuk

mempercepat pembangunan wilayah perbatasan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di kawasan tersebut.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada wilayah perbatasan RI-Malaysia, pemerintah pusat secara langsung melakukan revitalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang diyakini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar PLBN. Dana yang di kucurkan pun dijadikan prioritas utama percepatan pembangunan nasional. Data yang di dapat pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2017 pemerintah mengharapkan adanya pengurangan tingkat konsumsi per kapita secara umum pada kelompok masyarakat atas.



*Gambar 1.1 Perkembangan Indeks Gini 2009-2017*

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2017)

Hasil di atas bertujuan untuk menurunkan ketimpangan antara masyarakat tingkat atas dan bawah di Indonesia menjadi 0,38 pada 2018. Angka ini lebih rendah satu poin dibandingkan dengan target tahun ini, yakni 0,39. Sebelumnya, angka ketimpangan pada September pada 2016 sebesar 0,394 atau menurun dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,402. Sehingga pemerataan perekonomian yang ada di wilayah perbatasan RI-Malaysia. Seperti halnya dengan pembangunan infrastruktur pada perbatasan untuk mewujudkan pemerataan berkeadilan di

wilayah perbatasan RI-Malaysia. Untuk melihat alur tujuan pembangunan yang revitalisasi sekaligus infrastruktur penunjang.



*Gambar 1.2 Alur Manfaat Pembangunan Jalan Perbatasan*

Sumber: indonesiabaik.id 2017 (diolah)

Dengan adanya pembangunan yang di estimasikan rampung akhir tahun 2017, bisa mendorong seluruh kegiatan perekonomian masyarakat hingga mencapai kesejahteraan sosial yang baik. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono menyatakan pembangunan infrastruktur di perbatasan tidak hanya mendorong perkembangan ekonomi di perkotaan, namun juga untuk mengurangi ketimpangan.

Provinsi Kalimantan Barat khususnya yang berbatasan darat langsung dengan wilayah Sarawak Malaysia, tentu tidak terhindar dari masalah atau problema pada aspek keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Aspek tersebut antara letak daerah yang berada di wilayah perbatasan dengan negara lain (Malaysia) dan sebagian besar mata pencaharian warga adalah tani. Selain bertani, kegiatan jual beli merupakan kegiatan rutin sehari-hari sebagai tombak kehidupan di perbatasan Entikong. Begitu Pula di PLBN Aruk, Sajingan Besar. Roda perekonomian yang berjalan saat ini menunjukkan bahwa setiap masyarakat yang melakukan kegiatan perekonomian harus tetap dibawah pengawasan pemerintah setempat. Namun kebutuhan pangan seperti minyak goreng masih bergantung kepada Malaysia.

Hanya saja, bangunan PLBN Aruk yang megah dengan berbagai fasilitas yang mumpuni belum mampu menarik masyarakat dari negara Malaysia untuk datang ke wilayah Indonesia dan mendorong perekonomian Warga (pontianak.tribunnews.com. Akses 10.25, 06/11/2020).

Problem lain pun muncul ketika desakan oleh Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, SH, M.Hum melalui pontianak.tribunnews.com (akses 21:45, 26/07/2020) tentang pembubaran Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia, bahwa dinilai tidak memberikan kontribusi besar dalam ekonomi masyarakat di perbatasan. Seharusnya potensi yang ada seperti perekonomian yang ada di Indonesia bisa dibawa ke wilayah sekitar perbatasan hingga masuk ke dalam wilayah Malaysia. Sebaliknya potensi ekonomi yang ada disana dapat dibawa ke Indonesia.

Problem tersebut di anggap serius mengingat pintu Indonesia sudah menganggap salah satu Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk sebagai pintu ekspor, sementara dari pihak serawak (Malaysia) belum menerapkan hal tersebut. Hal yang sama terjadi di wilayah Entikong khususnya. Di masa sulit pada saat wabah Covid-19 perekonomian masyarakat masih tergantung pada interaksi perdagangan lintas batas kedua negara, Indonesia-Malaysia, terutama di lima kecamatan di Kabupaten Sanggau yakni, Entikong dan Sekayam, yang berbatasan langsung dengan Sarawak Malaysia, serta tiga kecamatan lainnya yakni Noyan, Beduai, dan Kembayan. Hingga akhirnya perekonomian masyarakat menjadi sulit dengan ditambahnya Malaysia memberlakukan *lockdown*, jauh terasa lebih sulit (kalbar.antaranews.com. Akses 10.38, 06/11/2020)

Selain itu problem yang di dapat dari peneliti terdahulu menjelaskan maraknya kasus *human trafficking*. Daerah perbatasan itu mencakup lima kabupaten, masing-masing yaitu Aruk (Kabupaten Sambas), Jagoi Babang (Bengkayang), Entikong (Sanggau), Jasa (Sintang), dan Badau (Kapuas Hulu). “Dari lima perbatasan itu, wilayah Entikong merupakan yang paling rawan. Berdasarkan data LSM Anak Bangsa pada Oktober 2010 terdapat 200 korban trafficking yang ditangani, yang mana 90% merupakan anak-anak (Niko & Niko, 2017). Ini menandakan bahwa kesejahteraan sosial di wilayah perbatasan dinilai sangat membutuhkan perhatian khusus oleh pemerintah. Dasarnya yaitu dikarenakan keterbatasan akses sumber daya dan kurangnya pemahaman terhadap masyarakat yang tidak mengetahui bahaya fenomena ini. Ini mengacu kepada keamanan suatu negara akan menjaga potensi maupun ancaman kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah perbatasan. Kehidupan masyarakat di perbatasan RI-Malaysia tidak terlepas dari kondisi yang kadang kala membaik dari segi tertentu, kadang pun tidak.

Hal ini menunjukkan betapa selama ini kita mengetahui sebenarnya revitalisasi PLBN terhadap kesejahteraan sosial masyarakat yang ada di wilayah Kalimantan Barat tidak sedang dalam keadaan yang semestinya. Melalui instansi pemerintah perlu lebih memperhatikan Badan Nasional Perbatasan (BNPP) dalam hal pembangunan perbatasan. Untuk mendukung implementasi yang nyata, organisasi harus memperkuat secara internal, merancang kapabilitas pengembangan yang kuat, memiliki kapabilitas finansial, dan melaksanakan rencana keberlanjutan yang jelas dan transparan.

Bahwa daya tarik suatu analisis ini merujuk kepada dampak setelah direvitalisasinya PLBN terhadap kesejahteraan sosial yang berada di sekitarnya.

Dilihat dari beberapa permasalahan yang ada, tesis ini bertujuan memberikan jawaban terhadap problematika yang disimpulkan dari analisis yang ada di lapangan dengan melihat situasi dan kondisi lapangan yang ditentukan. Pendekatan yang ada nantinya akan memuat tentang prinsip dipadukan dengan hasil yang sesuai berdasarkan indikator yang digunakan di dalamnya. Maka menarik jika di kaji pembangunan wilayah perbatasan dalam menunjukkan *present of state* dapat dilakukan secara nyata oleh BNPP dengan menghadirkan kegiatan ekonomi yang harus dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah perbatasan. Hal ini dapat diumpamakan seperti wilayah Batam, yang memiliki kegiatan perekonomian yang tinggi.

Dengan adanya kegiatan perekonomian di wilayah perbatasan seperti di Batam, selain dapat menghadirkan negara di wilayah perbatasan, juga akan meningkatkan kesejahteraan pada penduduk di wilayah perbatasan. Aktifitas perekonomian tersebut dapat berlangsung dengan baik jika ada jaminan keamanan oleh pemerintah. Disinilah BNPP sebagai ujung tombak harus berperan untuk dapat berkoordinasi dengan aparat yang terkait menghadirkan keamanan di wilayah perbatasan. Sehingga adanya kegiatan perekonomian yang aman itu, maka akan menarik minat warga masyarakat sekitar perbatasan untu melakukan aktivitas perekonomian. Mereka akan mendatangi wilayah perbatasan yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan, sekaligus meningkatkan keamanan di daerah tersebut.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses pelaksanaan revitalisasi pada tiga PLBN (Aruk, Entikong, Badau) RI-Malaysia?

2. Apa dampak revitalisasi PLBN RI-Malaysia terhadap kesejahteraan sosial pada poros utara perbatasan Malindo di wilayah darat Kalimantan Barat?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dan kegunaannya pada penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui tingkat capaian kesejahteraan sosial pada poros utara perbatasan Indonesia-Malaysia Tahun 2016-2018. Adapun tujuan dan kegunaannya sebagai berikut:

- (1) Mendeskripsikan proses pelaksanaan revitalisasi PLBN di tiga wilayah Kalimantan Barat, diantaranya PLBN Aruk, Entikong dan Badau.
- (2) Mendeskripsikan capaian kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah Perbatasan RI-Malaysia dalam rentang tahun 2016-2018 setelah adanya revitalisasi Pos Lintas Batas Negara di tiga daerah, Aruk, Entikong dan Badau.
- (3) Guna untuk merumuskan capaian kesejahteraan sosial di sekitar perbatasan wilayah RI-Malaysia sebelum dan sesudah terjadinya revitalisasi di tiga lintas batas negara.
- (4) Menunjukkan model atau stukturalisasi tatakelola kesejahteraan sosial tingkat sub-daerah yang selain efektif, juga sensitif dengan keberagaman yang ada.
- (5) Menyajikan hasil riil, yang diterapkan di wilayah yang di tentukan dan bersifat terbatas.

#### **1.3.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini memiliki nilai guna dan kemanfaatan bagi masyarakat ilmu, terkait dengan dua hal:

- a. Implementasi keilmuan, secara teori berupa perluasan paradigma terhadap perspektif dampak revitalisasi PLBN terhadap kesejahteraan



sosial masyarakat perbatasan RI-Malaysia di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Pergeseran paradigma tersebut justru lebih penting mengingat kesejahteraan sosial memiliki makna yang luas dan tidak terkungkung dalam satu teori tertentu.

- b. Menjawab keterbatasan literatur. Diharapkan tesis ini memberi jawaban langsung terhadapnya dengan kajian kesejahteraan sosial, khususnya di wilayah perbatasan RI-Malaysia, Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga masa mendatang sangat terbuka kemungkinan bagi peneliti lain mengembangkan dan memperbaiki yang sudah dimulai dengan cakupan keilmuan yang luas.

#### 1.3.2. Manfaat Paradigmatis

Hasi penelitian ini diharapkan memiliki nilai guna terkait kebijakan publik yang lebih luas dengan dilakukannya pergeseran paradigmatik dari cara pandang dunia (*world view*) dalam mendekati persoalan kewilayahan. Seperti diketahui selama ini terhadap cara pandang yang seolah mengharuskan semua pemahaman dan pengetahuan kewilayahan hanya berdasar wilayah administrasi pemerintah yang ada. Bahkan untuk yang seharusnya melepas diri dari cara pandang yang demikian. Jika ada yang menyisih cara pandang tersebut itu terjadi lebih disebabkan dalam pengertian kesementaraan. Tesis ini menunjukkan operasionalisasinya dalam praktik sub-daerah, yang diketahui sebagai level di bawah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, mencakup seluruh daerah ruang kerjanya.